

The Policy Evaluation of Garbasari Stunting Management Program in Badung Regency

Evaluasi Kebijakan Program Garbasari dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Badung

Ni Nengah Ayu Mahartini¹, Made Agus Sugianto^{2*}, I Putu Dedy Kastama Hardy³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: madeagussugianto@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords:

Garbasari, Policy Evaluation, Stunting

Abstract

Due to chronic malnutrition, particularly in the first 1,000 days of life, stunting is a condition in which children under the age of five fail to thrive. Stunting is defined as having a height at age that is below the national average or the Z-Score index for TB/U -2 SD. Stunting instances in Badung Regency fell by 6.1% in 2020. However, the stunting rate at the Petang II Health Center was high at 20.7%. The purpose of this study is to assess the effectiveness of the Garbasari program's stunting prevention strategy in Badung Regency. This study uses a cross-sectional, descriptive quantitative research design. There are 42 samples in all (total sampling method). The Republic of Indonesia's State Administration will evaluate the Policy Quality Index in 2021 using the findings of questionnaires and document reviews. The research's findings on the evaluation of the evaluation of the classification policy's agenda setting are good (94.0%), the evaluation of the policy's formulation is good (92.5%), the implementation of the policy is moderate (73.5%), and the evaluation of the policy's evaluation of the classification of the stunting prevention program is not good (38.7%).

Kata kunci:

Garbasari, Evaluasi Kebijakan, Stunting

Abstrak

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK. Tergolong stunting apabila tinggi badan menurut umur lebih rendah dari pada standar nasional atau nilai Z-Score indeks TB/U < -2 SD. Tahun 2020 kasus stunting di Kabupaten Badung sudah menurun yaitu 6,1%. Tetapi pada Puskesmas Petang II angka stunting tinggi 20,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program garbasari dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Badung. Penelitian ini deskriptif kuantitatif, design penelitian cross sectional. Jumlah sampel 42 orang (metode total sampling). Analisa data Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021 dari hasil kuesioner dan telaah dokumen. Hasil penelitian penilaian evaluasi agenda setting kebijakan klasifikasi baik (94,0%), penilaian evaluasi formulasi kebijakan klasifikasi baik (92,5%), penilaian evaluasi implementasi kebijakan klasifikasi sedang (73,5%) dan penilaian evaluasi kebijakan program penanggulangan stunting klasifikasi tidak baik (38,7%).

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih dihadapi Indonesia sampai saat ini. Persentase balita *stunting*, berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2019 kondisi Indonesia masih tergolong tinggi, dimana prevalensi *stunting* sebesar 27,67%. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari pada standar nasional yang berlaku atau nilai *Z-Score* untuk indeks TB/U < -2 SD (Kementerian Kesehatan, 2020).

Pada tahun 2020 telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* Indonesia dari 30,8% tahun 2018 menjadi 27,67% tahun 2019, dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 26,92% (Kementerian Kesehatan, 2021). Meski menurun, tetapi angka ini masih dinilai tinggi, karena angka toleransi WHO untuk *stunting* adalah sebesar 20%. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kualitas generasi bangsa. Anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan dapat menjadi generasi yang dapat menunjang kesuksesan pembangunan bangsa (Supriasa, IDN., Bakri, Bachyar., Fajar, 2014). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, angka *stunting* di Provinsi Bali turun dari tahun 2018 yaitu 21,8% menjadi 19,1% pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 turun kembali menjadi 10,9%. Sementara itu, angka *stunting* di Kabupaten Badung pada tahun 2018 tercatat sebanyak 25,24% lalu menurun menjadi 8,1% pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020 angka *stunting* kembali menurun menjadi 6,1%. Berdasarkan profil kesehatan Puskesmas Petang II, angka *stunting* pada tahun 2019 mencapai 21,7% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 20,7%, angka ini melebihi ambang batas Kementerian Kesehatan yaitu 20% (UPT Puskesmas Petang II, 2021).

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menetapkan Peraturan Presiden yang menerapkan konsep penanganan *stunting* yang holistik dan integratif dengan melibatkan multisektor dari tingkat pusat hingga desa sehingga dapat menyoal kelompok rentan seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0-59 bulan (Perpres, 2021).

Pemerintah Kabupaten Badung telah menerbitkan surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 1920/0413/HK/2019 tentang Gerakan Badung Sehat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Garbasari), dan Surat Keputusan Nomor: 1763/0413/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting*, disebutkan bahwa gerakan tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat di Kabupaten Badung untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Garbasari (Gerakan Badung Sehat di 1000 Hari pertama Kehidupan) di Kabupaten Badung, dimulai dengan pemantauan pada 270 hari pada masa kehamilan ditambah dengan 730 hari (pada masa bayi lahir sampai 2 tahun). Pelaksanaan kegiatannya berlangsung dari terciptanya Posyandu Remaja, Saka Bhakti Husada (sasaran remaja usia produktif sebagai persiapan calon Ibu), Kelas Ibu Hamil (Dengan sasaran seluruh ibu hamil). Indikator rencana kerja dan anggaran Garbasari yaitu Posyandu Remaja, Kelas Ibu Hamil, Ruang Menyusui, Kelompok Pendukung ASI, Posyandu Balita, Kelas Balita dan STBM (Peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih) (Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2019).

Melalui kebijakan program penanggulangan *stunting* garbasari diharapkan dapat menurunkan angka kasus *stunting* di wilayah Kabupaten Badung, terutama pada wilayah Puskesmas Petang II yang angka *stunting* masih melebihi ambang batas diatas 20%. Melalui hal ini bahwa pentingnya keberhasilan kebijakan program penanggulangan

stunting dilihat dari efektivitas pengelolaan manajemen Puskesmas dan tidak hanya ditentukan oleh komponen input, namun juga dari inovasi dan upaya aktif melakukan strategi promosi kesehatan untuk meningkatkan pemberian gizi yang baik dalam masyarakat. Peran petugas kesehatan juga penting untuk meningkatkan dan mendukung upaya program *stunting* yang dapat dilihat keterlibatannya yang luas dari aspek sosial (Masyarakat & Sriwijaya, 2021).

Evaluasi merupakan suatu proses mendapatkan informasi mengenai jalannya suatu kegiatan atau program kesehatan dimana perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan berdasarkan standar-standar tertentu untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan (Rusmini, 2007).

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa evaluasi kebijakan program penanganan *stunting* pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung belum berjalan efektif dengan indikator tidak tercapainya penurunan prevalensi *stunting* Rencana Jangka Menengah (Handayani, 2019). Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peran kualitas kebijakan, dalam pelaksanaannya menggunakan penilaian kualitas kebijakan untuk menilai secara mudah dan cepat. Dalam penyusunan kebijakan diharapkan peningkatan kualitas kebijakan yang baik agar kebijakan dapat mendukung terlaksananya program yang sedang berlangsung, sehingga tujuannya tercapai dengan tepat sasaran dan angka kasus menurun (RI, 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian “Evaluasi Kebijakan Program Garbasari Dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Badung”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung. *Design* penelitian ini adalah *Cross sectional*. Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan 13 UPT Puskesmas Kabupaten Badung, waktu penelitian telah dilakukan selama 3 bulan pada 18 April 2022 sampai dengan 18 Juni 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penanggung jawab pengelola program penanggulangan *stunting* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan seluruh penanggung jawab pengelola program penanggulangan *stunting* pada 13 UPT Puskesmas Kabupaten Badung, yaitu berjumlah 42 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, terdiri dari: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan pengelola program gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 13 Kepala UPT Puskesmas Kabupaten Badung, 13 orang masing – masing pengelola program gizi UPT Puskesmas Kabupaten Badung dan 13 orang dari bidan koordinator program KIA di masing – masing UPT Puskesmas Kabupaten Badung.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berpedoman pada buku pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Bersumber dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di mana salah satu indikator pencapaian

Reformasi Birokrasi Nasional ialah melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan. Dan berdasarkan surat edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, paling tidak ada empat tahapan pengolahan data yang harus dilalui: *Data Editing*, *Coding Data*, *Processing* dan *Data Cleaning*. Analisis data deskriptif kuantitatif adalah suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu, data dihitung secara akurat serta diharapkan dapat menginterpretasikan data yang kompleks (Meiryani, 2021). Pada penelitian ini analisa data mengacu pada buku pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021 dari hasil kuesioner dan telaah dokumen. Hasil penilaian persentase atau bobot nilai berdasarkan jawaban responden dan bobot indikator seperti pada tabel:

Tabel 1. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Tahapan / Pertanyaan Kunci	Persentase/Bobot
I. Perencanaan Kebijakan	
Penilaian Agenda Setting	
Persentase penilaian 45%	
Identifikasi dan validasi masalah	55%
Penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan	45%
Sub total skor	100%
Penilaian Formulasi Kebijakan	
Persentase penilaian 55%	
Karakteristik mendasar	10%
Berorientasi kedepan	15%
Outward looking	20%
Berbasis bukti	40%
Inovatif	15%
Sub total skor	100%
II. Pelaksanaan Kebijakan	
Penilaian Implementasi kebijakan	
Persentase penilaian 50%	
Pengorganisasian	30%
Komunikasi kebijakan	35%
Monitoring implementasi kebijakan	35%
Sub total skor	100%
Penilaian Evaluasi kebijakan	
Persentase penilaian 50%	
Efektivitas	40%
Efisiensi	15%
Evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan	45%
Sub total skor	100%

Nilai yang didapatkan kuesioner kemudian diklasifikasikan menjadi:

1. Skor <50 % = Tidak Baik
2. Skor 50% - 80% = Sedang
3. Skor >80% = Baik

(Sumber: RI, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Penilaian Evaluasi Agenda Setting Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

Tabel 2. Distribusi Variabel Penelitian Penilaian Evaluasi Agenda Setting Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

No	Klasifikasi Penilaian (Skor)	Frekuensi (n=42)	Persentase (%)
1	Tidak Baik (<50%)	0	0.0
2	Sedang (50%-80%)	4	10.5
3	Baik (>80%)	38	89.5

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2022)

Berdasarkan tabel 2. Kualifikasi penilaian evaluasi agenda setting kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan kategori baik skor 89,5%. Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa penentuan masalah dalam penyusunan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung berasal dari atas (*top down*) karena peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Gerakan Badung Sehat Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan, mengacu pada kebijakan pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menetapkan Peraturan Presiden yang menerapkan konsep penanganan *stunting* yang holistik dan integratif dengan melibatkan multisektor dari tingkat pusat hingga desa sehingga dapat menjangkau kelompok rentan seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0-59 bulan (Perpres, 2021). Selain itu penentuan masalah juga diperoleh secara *bottom up*, yaitu dengan melibatkan *stakeholders*. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan *stakeholders* eksternal dan partisipasi kelompok sasaran melalui rapat yang diadakan baik dari tingkat desa dan kecamatan wilayah masing – masing desa / kelurahan di Kabupaten Badung.

Selanjutnya identifikasi masalah kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung berkaitan langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah. Kebijakan ini mengacu pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pilar ke lima tentang penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi (Perpres, 2021). Peran *stakeholder* di Kabupaten Badung sangat bagus, hal ini terlihat dari persentase kehadiran tim terpadu penanggulangan *stunting* garbasari mencapai 95%, perhatian stakeholder atau publik sangat intensif terhadap masalah yang menimbulkan konflik terhadap terjadinya kasus *stunting* sehingga mendesak instansi Kabupaten Badung mengambil kebijakan. Menurut Nurfauziah et al (2021) dalam proses mengatasi masalah *stunting*, para *stakeholder* harus dapat saling berintegrasi demi mencapai tujuan bersama. Modal utama dalam kolaborasi adalah komunikasi. Kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kekuatan terbesar dalam penanganan masalah *stunting*.

B. Penilaian Evaluasi Formulasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

Tabel 3. Distribusi Variabel Penelitian Penilaian Evaluasi Formulasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

No	Klasifikasi Penilaian (Skor)	Frekuensi (n=42)	Persentase (%)
1	Tidak Baik (<50%)	0	0.0
2	Sedang (50%-80%)	3	7.5
3	Baik (>80%)	39	92.5

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2022)

Berdasarkan tabel 3. Hasil penilaian formulasi kebijakan program penanggulangan stunting di Kabupaten Badung memperoleh nilai baik dengan skor 92,5%. Karena peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Gerakan Badung Sehat Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah memiliki tujuan yang dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami. Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2020 pasal 2 ayat 2, yaitu percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan di Daerah, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, dan memperkuat intervensi pencegahan *stunting* yang bersifat promotif dan preventif dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif (Bupati Badung, 2020).

Selain itu, Perbup no 75 tahun 2020 dapat menjawab permasalahan, tantangan ke depan yang dibuktikan dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional Garbasari dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Tingginya skor yang diperoleh pada aspek formulasi kebijakan juga karena materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan perangkat daerah yang terkait. Hal ini ditunjukkan dengan rencana aksi kegiatan penanggulangan *stunting* Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung.

Dari uraian tentang kebijakan program dan kegiatan penanggulangan *stunting* dalam Garbasari, kebijakan menawarkan atau memberikan alternative solusi baru terhadap permasalahan *stunting* yaitu >80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan. Termasuk >5 aspek yang memberikan nilai tambah / manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya program inovasi yang diluncurkan di desa / kelurahan Kabupaten Badung, antara lain : Sigarpu, keterlibatan lembaga adat, pemanfaatan media social secara masif, kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk intervensi *stunting* dan *stakeholders* eksternal internal yang berperan secara aktif dalam penanggulangan *stunting*.

C. Penilaian Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

Tabel 4. Distribusi Variabel Penelitian Penilaian Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

No	Klasifikasi Penilaian (Skor)	Frekuensi (n=42)	Persentase (%)
1	Tidak Baik (<50%)	4	10.5
2	Sedang (50%-80%)	31	73.5
3	Baik (>80%)	7	15.5

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2022)

Berdasarkan tabel 4. Hasil penilaian evaluasi implementasi kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung memperoleh nilai sedang dengan skor 73,5%. Tahapan penilaian implementasi kebijakan di bidang pengorganisasian dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan terlaksana, kemudian dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama terhadap Garbasari Kabupaten Badung. Hal ini terbukti dengan adanya penyedia layanan pencegahan *stunting*. Penyedia layanan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan layanan yang dapat dengan mudah diakses oleh sasaran 1.000 HPK. Fungsi penyedia layanan sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan menjadi tumpuan masyarakat sasaran dalam pencegahan *stunting*. Kejelasan unit kerja / kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan terdapat pada tim terpadu penanggulangan *stunting* pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020, terdiri dari : unsur Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha (Bupati Badung, 2020). Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi yang diharapkan pada kasus *stunting* yang terjadi pada desa / kelurahan di Kabupaten Badung, ditunjukkan pada Petunjuk Teknis Operasional Garbasari.

Pihak pelaksana implementasi kebijakan *stunting* Kabupaten Badung terus berupaya mengupayakan strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/pemangku kepentingan yang terkait secara sosialisasi dan pengorganisasian (rembug Garbasari) melibatkan pemberdayaan masyarakat Desa dan melalui pengembangan sekretariat bersama rumah Garbasari Desa. Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama rata – rata 4 – 6 kali, bahkan dibeberapa desa hanya 1 - 3 kali dengan penilaian tidak baik (skor 47,6%). Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan baru terdapat 2 – 3 jenis media komunikasi kebijakan. Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring dengan skor 42,9% (tidak baik), hal ini karena pelaksanaannya masih setiap semester dan setiap tahun. Kegiatan monitoring mencakup sedikit sebagian besar dan kebanyakan sebagian kecil ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun, termasuk >40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti.

D. Penilaian Evaluasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

Tabel 5. Distribusi Variabel Penelitian Penilaian Evaluasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting

No	Klasifikasi Penilaian (Skor)	Frekuensi (n=9)	Persentase (%)
1	Tidak Baik (<50%)	42	100.0
2	Sedang (50%-80%)	0	0.0
3	Baik (>80%)	0	0.0

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2022)

Berdasarkan tabel 5. Kualifikasi penilaian evaluasi program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan kategori tidak baik skor 38,7%. Rendahnya skor pada variabel evaluasi dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung belum pernah melaksanakan evaluasi kebijakan program penanggulangan *stunting*, baik tahapan evaluasi dari efektivitas, efisiensi dan evaluasi atas penerimaan, responsivitas, dampak dan kemanfaatan kebijakan secara maksimal. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan program penanggulangan *stunting* belum dilaksanakan karena anggaran yang sudah ditetapkan direlokasi untuk program penanggulangan Covid 19. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak murah, misalnya untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf dan evaluator. Untuk itu, hampir tidak mungkin melakukan evaluasi kebijakan tanpa adanya dukungan finansial yang cukup (Boli, 2020). Sumber daya evaluasi yang masih terbatas juga merupakan kendala dalam evaluasi, karena kegiatan evaluasi memerlukan kompetensi khusus sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tidak memiliki cukup sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang evaluasi kebijakan program penanggulangan *stunting*. Tanpa kompetensi khusus di bidang evaluasi, sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas kinerja kebijakan yang diambil. Walaupun evaluasi dilaksanakan, tentu hasilnya tidak optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang senyatanya. Hal ini sejalan dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam menurunkan angka *stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang masih mendapatkan banyak kendala (Haris, 2021).

SIMPULAN

1. Evaluasi proses perencanaan agenda setting kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan klasifikasi skor baik (89,5%), untuk skor tertinggi (94%) tentang intensif perhatian *stakeholder* sedangkan skor terendah (73,8%) pada aspek terkait faktor lain pendorong masalah kebijakan.
2. Evaluasi proses perencanaan formulasi kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan klasifikasi skor baik (92,5%), skor tertinggi (98,8%) tentang tujuan kebijakan sedangkan skor terendah (82,7%) terkait cara/metode baru.
3. Evaluasi proses pelaksanaan implementasi kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan klasifikasi skor sedang (73,5%), untuk skor tertinggi (100,0%) tentang kejelasan unit kerja sedangkan skor terendah (42,9%) tentang aspek intensitas monitoring.
4. Evaluasi proses pelaksanaan kebijakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Badung dengan klasifikasi skor tidak baik (38,7%), untuk skor tertinggi

(44,0%) pada pertanyaan responsivitas kebijakan dan pemberian dampak sedangkan skor terendah (31,0%) tentang efisiensi sumber daya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Dhyana Pura, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendukung kami dalam penulisan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini dikarenakan dukungan dari kampus. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boli, E. B. (2020). Analisis Kebijakan Gizi Dalam Upaya Penanganan Masalah Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat, Volume 2*(1), 23–30.
- Bupati Badung. (2020). *Perbup No 75 Tahun 2020 Garbasari*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. (2019). Profil Kesehatan Kabupaten Badung. *Kondisi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Badung*, 100.
- Handayani, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program 1000 HPK Dalam Penanganan Stunting Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. *International Journal of Project Management*.
- Haris, H. Z. (2021). *Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah*. Halaman 1-12.
- Kementerian Kesehatan. (2020). Situasi Stunting di Indonesia. In *Kementerian Kesehatan RI* (Vol. 270, Issue 5).
- Masyarakat, F. K., & Sriwijaya, U. (2021). *Evaluasi Program ASI Eksklusif*.
- Meiryani. (2021). Memahami Analisis Statistik Deskriptif dalam Penelitian Ilmiah.
- Nurfauziah, R., Noorsyarifa, G. C., & Irfan, M. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Tumbuh Kembang Anak Di Masa Pandemi (Studi Kasus Balita Kurang Gizi) The Role Stakeholders In Overcoming Children's Growth. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Perpres. (2021). Presidential Decree of Republic Indonesia No 72/2021 about Accelerating Stunting Reduction. *Indonesian Government*, 1, 23.
- RI, L. A. N. (2020). *Indeks Kualitas Kebijakan | IKK*.
- Rusmini. (2007). Aplikasi Dan Evaluasi Kebijakan (Analisis Kebijakan Walikota Jambi Tentang Penghapusan Pungutan Sekolah Dari Masyarakat). *Annual Conference on Islam Education Management (ACIEM)*, 853–865.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supariasa, IDN., Bakri, Bachyar., Fajar, I. (2014). *Penilaian Status Gizi* (Cetakan 20).
- UPT Puskesmas Petang II. (2021). *Profil Kesehatan UPT Puskesmas Petang II*.

